**PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PUBLIK
UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS
PENGUNAAN DANA PUBLIK**

Anissa Nur Silvia¹⁾, Rita Myrna²⁾

^{1,2)}an Program Studi administrasi keuangan publik, Universitas Padjadjaran
E-mail: anissa20001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This article explores the crucial role played by the public in the public budget planning process, focusing on how public participation can be enhanced to improve accountability and effective use of public funds. Public participation is not only an aspect of democratization, but also a key element in ensuring that public funds are allocated wisely and in accordance with the needs of the people. This research underscores the need to continue to encourage greater public participation in public budget planning, while addressing existing barriers. In conclusion, this article will highlight how an actively engaged public in the public budget planning process can strengthen accountability and effectiveness in the use of public funds, supporting the realization of a government that is more responsive to the needs of the people.

Keywords : *Planning, Public Budget, Accountability, Effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan di berbagai negara, perencanaan anggaran publik telah menjadi aspek krusial dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien (Melia & Sari, 2019). Dana publik merupakan sumber daya yang terbatas, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik semakin meningkat. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjalankan program-program yang bermanfaat bagi seluruh warga negara (Kumorotomo, 2020). Namun, sering kali, terdapat masalah dalam sistem perencanaan anggaran yang menyebabkan ketidakjelasan dalam alokasi dana dan potensi risiko korupsi.

Proses perencanaan anggaran publik merupakan tahap kunci dalam siklus anggaran pemerintah di mana alokasi sumber daya ke berbagai program dan proyek diatur. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, alokasi dana, dan penetapan prioritas pengeluaran yang akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perencanaan anggaran publik juga berperan penting dalam mencapai tujuan pemerintah, termasuk pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Iqbal, 2022). Namun, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini. Peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik mencakup partisipasi, pengawasan, dan pemantauan terhadap kebijakan dan program yang didanai oleh anggaran publik. Melalui partisipasi aktif dan pengawasan, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang lebih tepat sasaran, memastikan transparansi, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana

publik. Akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik menjadi fokus utama dalam proses ini, dan peran masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini akan menguraikan bagaimana partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam perencanaan anggaran publik dan bagaimana hal ini dapat menghasilkan manfaat nyata dalam bentuk penggunaan dana yang lebih efektif dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Anggaran publik adalah instrumen kunci dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan dana publik yang efisien dan akuntabel adalah dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan tujuan pembangunan (Ramadhani et al., 2019). Dalam hal ini, peran masyarakat sebagai mitra dalam proses perencanaan anggaran publik menjadi semakin signifikan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi, memberikan masukan, serta memastikan bahwa anggaran publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan bagaimana peran masyarakat menjadi kunci dalam proses perencanaan anggaran publik, dan bagaimana keterlibatan mereka dapat secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, artikel ini akan menjelaskan secara komprehensif peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik, menyoroti praktik terbaik, tantangan yang mungkin dihadapi, dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran masyarakat dalam anggaran publik, kita dapat memandangnya sebagai instrumen demokratisasi dalam pengambilan keputusan keuangan publik yang mampu mendorong kesejahteraan dan kemajuan bagi semua warga negara.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik. Masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, pemerintah dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang prioritas yang sebenarnya, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat, tingkat akuntabilitas pemerintah akan meningkat secara signifikan. Masyarakat menjadi penjaga penting dalam memantau penggunaan dana publik dan memastikan bahwa pemerintah memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana peran masyarakat dapat memperbaiki proses perencanaan anggaran publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi partisipatif dan tuntutan masyarakat akan pemerintah yang lebih bertanggung jawab.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur dalam artikel berjudul "PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK" adalah sebuah pendekatan yang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam, interpretasi, dan pengungkapan makna dari fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan studi literatur memberikan wawasan yang luas dan mendalam mengenai peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Metode penelitian ini dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan

dokumen pemerintah yang relevan. Pemilihan literatur harus memperhatikan kualitas, kebaruan, dan relevansi terhadap penelitian. Setelah literatur yang cukup telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengorganisasi literatur tersebut. Analisis literatur dalam metode penelitian kualitatif melibatkan proses membaca, merangkum, dan mengidentifikasi temuan-temuan utama yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik. Peneliti juga harus mencari pola atau tema yang muncul dalam literatur yang dianalisis. Pada tahap ini, peneliti dapat menggunakan teknik seperti analisis isi atau analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola tersebut. Selanjutnya, peneliti dapat menyusun temuan-temuan dari literatur ke dalam sebuah narasi yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Dalam proses ini, peneliti juga dapat mengintegrasikan pendekatan teoritis yang relevan untuk menjelaskan temuan-temuan tersebut. Selain itu, metode penelitian kualitatif dengan studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekosongan dalam penelitian yang ada dan mengeksplorasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, artikel ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang bagaimana partisipasi masyarakat memengaruhi penggunaan dana publik, sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses perencanaan anggaran publik yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah salah satu komponen utama dalam rangka mencapai tujuan akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan dana public (Wance, 2019). Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting yang mendorong transparansi, integritas, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan publik, dan berikut adalah sejumlah alasan mengapa hal ini sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat mempromosikan prinsip dasar demokrasi. Dalam sebuah sistem demokratis, masyarakat berhak untuk memahami dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana publik yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran, pemerintah menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan warganya, menciptakan kesempatan bagi warga negara untuk menyuarakan prioritas dan kebutuhan mereka. Kedua, partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana dana publik digunakan, maka peluang untuk penyalahgunaan atau korupsi menjadi lebih kecil. Partisipasi masyarakat memungkinkan pihak ketiga, seperti organisasi non-pemerintah dan media independen, untuk mengawasi penggunaan dana publik dan mengungkapkan ketidakberesan jika ada.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat menciptakan legitimasi sosial. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam perencanaan anggaran, keputusan yang diambil oleh pemerintah menjadi lebih sah dan lebih diterima oleh warga. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah lebih mungkin menjalankan kebijakan dan program yang mendapatkan dukungan dari masyarakat (Wijayanti et al., 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat membantu mengidentifikasi prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan warga memungkinkan pemerintah mendapatkan wawasan langsung tentang masalah dan kebutuhan yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, perencanaan anggaran menjadi lebih berfokus pada proyek dan program yang benar-benar relevan dan penting bagi masyarakat. Terakhir, partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ketika

masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, mereka membawa beragam perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang berharga ke meja keputusan. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam menjadikan proses perencanaan anggaran publik lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Ini memperkuat dasar demokrasi, mengurangi risiko penyalahgunaan dana publik, memperkuat legitimasi pemerintah, mengidentifikasi prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas keputusan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik adalah kunci untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas yang lebih baik dalam penggunaan dana publik.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik merupakan suatu aspek yang fundamental dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana public (Sugiarto & Mutiarin, 2019). Hal ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembentukan prioritas anggaran, menjadikan mereka sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran publik tidak hanya sebatas memberi ruang bagi pengamatan dan komentar, tetapi lebih dari itu, memberikan platform bagi warga negara untuk berkontribusi dalam merancang program-program yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik mengharuskan pemerintah untuk lebih terbuka terhadap aspirasi dan kebutuhan warga negara. Melalui forum-forum partisipasi seperti rapat terbuka, konsultasi publik, dan forum online, masyarakat dapat mengemukakan gagasan, saran, dan kritik mereka terhadap rencana anggaran yang diajukan. Pada tahap awal perencanaan, pendapat masyarakat bisa membentuk visi dan tujuan anggaran, memungkinkan adanya kebijakan yang lebih inklusif dan mencerminkan beragam kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang kuat. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan dana publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih mungkin terwujud. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, kesempatan untuk penyalahgunaan dana publik atau korupsi dapat diminimalkan. Dalam kasus ini, masyarakat berperan sebagai mata dan telinga yang memantau penggunaan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain manfaat manajemen dana yang lebih baik, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran publik juga dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan anggaran, mereka lebih cenderung mendukung anggaran tersebut, bahkan jika kebijakan tersebut mungkin melibatkan pengorbanan. Ini dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pemerintah dan warga negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial.

Namun, untuk mencapai partisipasi masyarakat yang efektif, penting untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik, ketidaksetaraan dalam akses informasi, dan kendala finansial. Proses perencanaan anggaran publik yang inklusif harus memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dalam kesimpulan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran publik adalah komponen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Ini membuka pintu untuk pengambilan keputusan yang lebih transparan dan inklusif, memungkinkan masyarakat untuk merumuskan prioritas mereka, dan membantu memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga negara.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Publik

Transparansi dalam penggunaan dana publik menciptakan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat dapat melacak, memahami, dan memonitor bagaimana dana publik dialokasikan, dihabiskan, dan apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Sugiarto & Mutiarin, 2019). Dengan informasi yang transparan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memeriksa apakah pemerintah benar-benar mengalokasikan dana publik dengan cara yang mendukung kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau sekelompok kepentingan tertentu. Ini memberikan kontrol dan tanggung jawab kepada warga negara untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah konsep yang tak terpisahkan dari transparansi. Dalam konteks perencanaan anggaran publik, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana public (Supraja, 2019). Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, pemerintah diharapkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang cara dana publik digunakan. Ini mencakup penjelasan tentang alokasi anggaran, keputusan pengeluaran, serta hasil yang telah dicapai melalui penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas adalah alat penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik.

Ketika transparansi dan akuntabilitas saling terkait, dampaknya pada efektivitas penggunaan dana publik sangat positif. Masyarakat yang memiliki akses ke informasi yang lengkap dan benar tentang anggaran publik dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang tepat. Mereka dapat memberikan umpan balik, mengusulkan perubahan, atau bahkan menunjukkan penyimpangan yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, efektivitas anggaran dapat ditingkatkan karena transparansi dan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika warga negara merasa bahwa pemerintah bersedia untuk memperlihatkan bagaimana dana mereka digunakan dan siap bertanggung jawab atas tindakan mereka, hal ini menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan dalam suatu negara. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas adalah landasan yang krusial dalam proses perencanaan anggaran publik, dan keduanya bekerja bersama-sama untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Masyarakat perlu memiliki akses yang baik ke informasi anggaran dan mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dana publik. Dengan demikian, ini akan mendorong perencanaan anggaran yang lebih bijak dan berorientasi pada kepentingan umum, menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Publik adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik. Transparansi mengacu pada tingkat keterbukaan dan keterlihatan informasi anggaran kepada masyarakat secara umum. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, informasi anggaran harus tersedia secara luas dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi anggaran melibatkan publikasi anggaran secara rinci, termasuk alokasi dana untuk berbagai program dan proyek, serta sumber pendanaan yang digunakan. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk akuntabilitas. Selain itu, akuntabilitas adalah konsep kunci dalam penggunaan dana publik. Ini mencakup tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan

bagaimana dana publik telah digunakan, apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan apakah manfaat yang diharapkan telah tercapai. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dengan memonitor penggunaan dana publik dan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan dana yang mungkin terjadi. Mereka juga dapat menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penggunaan dana publik melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, pengaduan publik, dan partisipasi dalam proses pemantauan anggaran (Supraja, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik juga melibatkan pengembangan alat dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memantau anggaran dengan mudah. Ini dapat mencakup penyediaan laporan anggaran tahunan yang komprehensif, dasbor online yang interaktif untuk melacak pengeluaran pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam audit dan pemeriksaan anggaran. Keuntungan dari transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sangat besar. Masyarakat yang lebih terinformasi dan sadar akan anggaran publik memiliki kemampuan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, memastikan dana publik digunakan secara efisien, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Dalam konteks peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik, transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting untuk mencapai tujuan akhir, yaitu peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam memantau penggunaan dana publik dan memahami proses perencanaan anggaran memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dan Hambatan dalam Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran Publik

Tantangan dan Hambatan dalam Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran Publik merupakan aspek kritis dalam upaya untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran public (Gunawan, 2019). Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penghalang dalam menjalankan inisiatif ini. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik dan kompleksitasnya. Anggaran publik sering kali dianggap sebagai hal yang rumit dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Kurangnya literasi anggaran, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau informasi yang mudah dipahami, membuat masyarakat kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan anggaran. Selain itu, hambatan lainnya adalah resistensi oleh birokrasi pemerintah. Beberapa elemen dalam birokrasi mungkin enggan untuk membuka diri terhadap partisipasi masyarakat karena takut akan perubahan atau kehilangan kendali (Sumege, 2019). Hal ini dapat menghambat upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik. Masyarakat harus berhadapan dengan tugas sulit untuk mengatasi resistensi ini dan memastikan bahwa pemerintah benar-benar terbuka terhadap partisipasi mereka.

Keterbatasan sumber daya juga merupakan hambatan serius dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran publik. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke teknologi, sumber daya informasi, atau bahkan waktu luang mungkin kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam proses ini. Oleh karena itu, perlu upaya tambahan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat mencakup berbagai kelompok, termasuk mereka yang mungkin

kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, perlu juga dicermati masalah politisasi dari proses perencanaan anggaran publik. Dalam beberapa kasus, partai politik atau kepentingan pribadi dapat mendominasi proses tersebut, sehingga masyarakat merasa sulit untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya mewakili kebutuhan mereka (Pangkey & Pinatik, 2019). Hal ini dapat mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat dan membuat mereka merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai. Dalam mengatasi tantangan dan hambatan ini, penting untuk menciptakan pendekatan yang inklusif dan mendukung pendidikan masyarakat tentang anggaran publik. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memberikan informasi yang mudah dimengerti, mempromosikan partisipasi, dan memastikan bahwa proses perencanaan anggaran publik lebih transparan dan terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan ini, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran publik dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik.

Bentuk Tantangan dan Hambatan dalam Melibatkan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam usaha meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana publik. Terlepas dari potensi positifnya, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran publik seringkali dihadapi oleh beberapa tantangan dan hambatan yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan. Salah satu tantangan yang paling umum adalah keterbatasan sumber daya. Masyarakat, terutama yang kurang terwakili, mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini (Achayani & Cahya, 2019). Keterbatasan aksesibilitas teknologi dan literasi anggaran juga dapat menjadi hambatan, terutama di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, resistensi oleh birokrasi pemerintah dapat menjadi kendala signifikan. Beberapa birokrat mungkin merasa bahwa melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran akan meningkatkan kompleksitas dan waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Mereka mungkin merasa terancam oleh pengawasan lebih ketat dari masyarakat. Sementara itu, perubahan budaya dalam administrasi publik yang mendorong partisipasi aktif masyarakat juga memerlukan waktu dan upaya yang signifikan (Putri, 2019).

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik juga menjadi hambatan serius. Bagi sebagian besar masyarakat, anggaran publik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kompleks dan sulit dimengerti. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anggaran publik dan cara kerjanya adalah faktor penting dalam memungkinkan partisipasi yang efektif (Firdiansyah Adiwirya & Sudana, 2019). Diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi anggaran dan menyediakan informasi yang mudah dimengerti kepada masyarakat. Selain itu, masalah politis dan kebijakan juga dapat menjadi hambatan. Beberapa proyek perencanaan anggaran publik dapat menjadi kontroversial, dan kepentingan politik tertentu mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan resistensi terhadap partisipasi masyarakat yang dapat mengancam keberlangsungan proyek-proyek tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan ini, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan efektivitas yang lebih besar dalam penggunaan dana publik.

4. KESIMPULAN

Peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Melalui partisipasi aktif dan terlibatnya masyarakat dalam tahapan perencanaan anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam alokasi dana publik. Partisipasi masyarakat juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena

masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran publik cenderung lebih merasa memiliki dana tersebut, sehingga mereka akan lebih cermat dalam memantau penggunaannya. Dalam beberapa studi kasus, partisipasi masyarakat telah membantu mengidentifikasi proyek-proyek yang lebih penting dan memberikan wawasan yang diperlukan untuk memperbaiki alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Namun, terdapat pula tantangan dalam melibatkan masyarakat, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan anggaran atau hambatan birokratis. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif harus melibatkan edukasi masyarakat, memastikan bahwa informasi anggaran mudah diakses dan dimengerti, serta menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan terbuka. Dalam kesimpulan, peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan mengintegrasikan perspektif dan aspirasi masyarakat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih mendekati kebutuhan riil masyarakat. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dana publik dapat digunakan dengan lebih efisien, proyek-proyek yang lebih bermanfaat dapat diprioritaskan, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran publik harus terus didorong dan diperkuat untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan efektivitas yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achayani, F., & Cahya, B. T. (2019). Analisis Aspek Rasional Dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Surakarta (Vol. 7, Issue L).
- Firdiansyah Adiwirya, M., & Sudana, I. P. (2019). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11.
- Gunawan, D. R. (2019). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL*. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>
- Iqbal, M. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5.
- Kumorotomo, W. (2020). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja Dan Silpa Dalam Alokasi Apbd Di Beberapa Daerah.
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 1068–1079.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2019). Analysis Of Effectiveness And Efficiency Budget In Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Province Sulawesi Utara. *In Analisis Efektivitas dan Efisiensi... Jurnal EMBA* (Vol. 33).

- Putri, D. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Ramadhani, R., Setiawan, M. A., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Jurusan,). (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/6>
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2019). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1–38. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4170>
- Sumege, A. S. (2019). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. In *74 Jurnal EMBA* (Vol. 1, Issue 3).
- Supraja, G. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 212–236. www.jpip.or.id
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. In *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* (Vol. 5).
- Wijayanti, A. W., Rahman, M., Muluk, K., & Nurpratiwi, R. (2019). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. *15*(3).